



RENCANA KERJA

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Kabupaten Sampang Tahun 2023 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

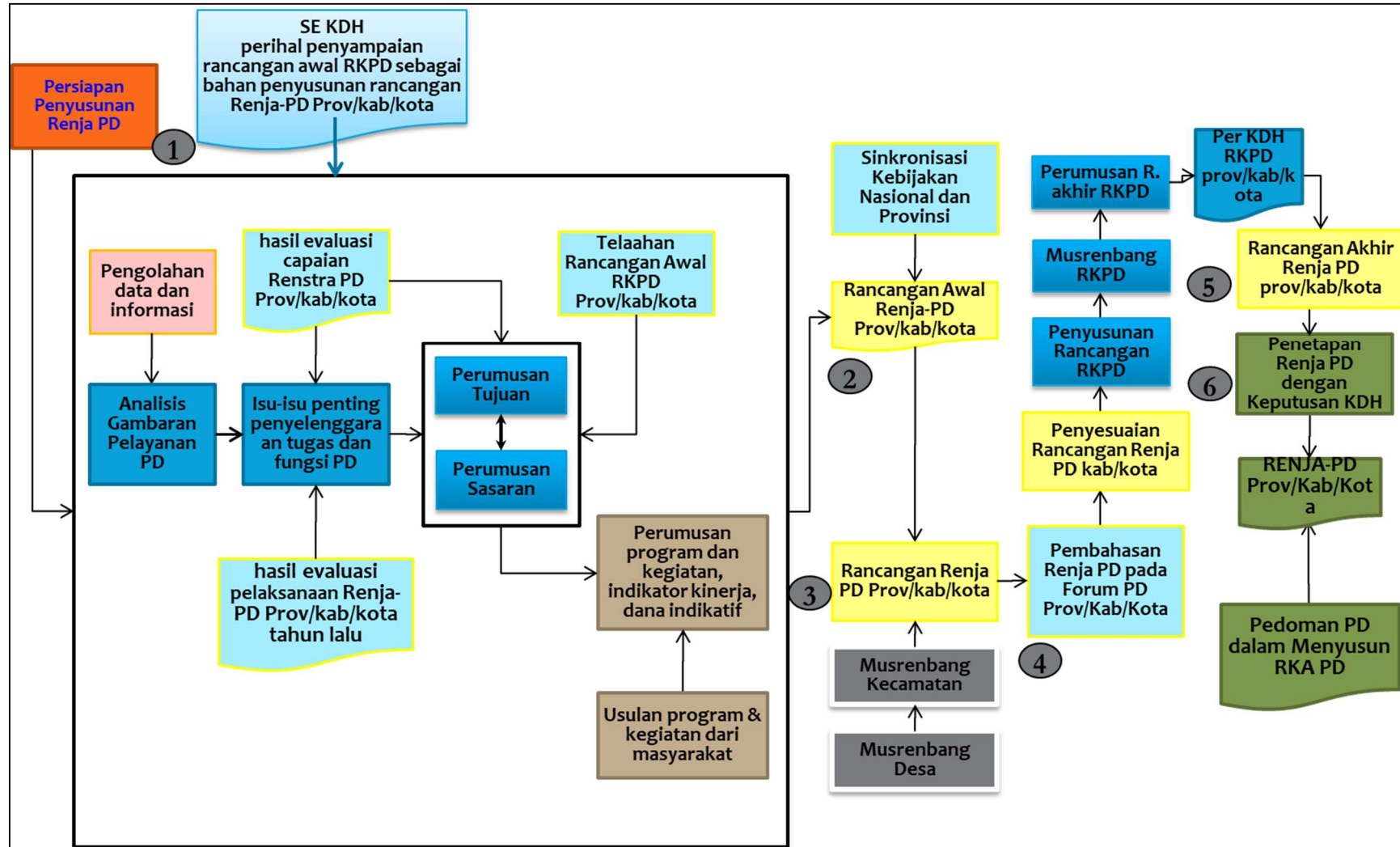
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2023.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 yaitu **“Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Pemanjapan Pemulihan Ekonomi serta Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia Menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatkan Akses Prasarana Dasar Perumahan dan Permukiman Kumuh serta Meningkatkan Akses Infrastruktur Perumahan ”**.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang - undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
 6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016

- tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 81);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

- Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
 39. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
 44. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 1);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2023 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2023.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2023 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kegiatannya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan – catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2022 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2019 -2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra 2019 - 2024.

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

Pada tahun anggaran 2022 Anggaran Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 35.586.056.279,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 14.644.397.706,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 20.941.658.573,- .Dengan total realisasi sebesar Rp.34.735.408.264,- (97,61%) terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.13.910.073.653,- dan Belanja Modal sebesar Rp.20.825.334.611. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 10 program dan 19 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

TabelT-C. 29.
Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup s/d Tahun 2022
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kabupaten Sampang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2020)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu n-2 (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan : Lingkungan Hidup										
1	03										
1	03	01		Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100			
1	03	01	01	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah surat terkirim	surat	5.400	950			
					Jumlah rekening listrik, air dan telepon	bulan	60	12			
					Jumlah STNK dan KIR kendaraan dinas roda 4, roda 3 dan roda 2	unit	425	85			

					Jumlah rapat staf meeting, rakor dinas yang dilakukan	ob	30	5						
					Jumlah tenaga kotrak honorarium daerah	ob	15	3						
1	03	01	02	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK	jenis	200	38						
					Jumlah barang cetakan dan penggandaan	jenis	75	12						
					Jumlah komponen instalasi listrik/alat penerangan	jenis	50	10						
					Jumlah perlengkapan kantor	jenis	15	2						
					Jumlah surat kabar	bulan	60	12						
					Jumlah peralatan kebersihan	jenis	150	31						
1	03	01	03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat – rapat koordinasi dinas luar daerah	ok	500	94						
					Jumlah rapat – rapat koordinasi dinas dalam daerah	ok	400	78						
1	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100						
1	03	02	01	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung ktr dan pagar kantor	pkt	5	1						
1	03	02	02	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli dan dipelihara	unit	375	60						
1	03	02	03	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan /pemeliharaan alat rumah tangga lainnya	unit	75	1						

					Jumlah pengadaan/ pemeliharaan perlengkapan kantor	Unit	475	61						
1	03	02	04	Pengadaan pakaian dinas	Jumlah pakaian seragam yang terpenuhi	jenis	5	0						
1	03	3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	100	36						
1	03	3	01	Pelaksanaan BinteK/Sosialisasi/Seminar	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	OK	75	15						
1	03	4		Program Peningkatan Sistem perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	%	100	100						
1	03	4	01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen LKJIP, laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	dok	20	5						
1	03	4	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	dok	20	4						
1	03	4	03	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah partisipasi pawai pembangunan yang diikuti	kali	10	0						
				Program Penataan dan Pengendalian lingkungan hidup	Persentase pelanggaran lingkungan yang dielesaikan	%	100	100						
					Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan	%	267	42						
				Penaatan dan pentaatan Lingkungan Hidup	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH	Usaha	600	60						
					Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	titik	310	62						
				Fasilitasi Pengaduan, pengendalian, dan penegakan	Tersedianya indeks kualitas air	Sampe l air	100	3						

				hukum lingkungan									
					Tersedianya indeks kualitas udara	Sampe l udara	80	3					
					Penyuluhan pengendalian polusi dan pencemaran	Kec	70	14					
					Peningkatan PSM dalam pengendalian	Event	10	0					
				Fasilitasi pengkajian dan analisis dampak lingkungan	Penyusunan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	dok	5	1					
				Peningkatan laboratorium lingkungan	Penyediaan bahan kimia laboratorium	jenis	150	28					
					Penyediaan alat kimia laboratorium	paket	5	1					
					Kalibrasi alat kimia laboratorium	paket	5	1					
				Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase penurunan timbulan sampah	%	110	17.4					
				Pengelolaan sampah dan limbah B3	Pengelolaan sampah dan limbah B3 di TPA	Keg	30	6					
				Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Keg	30	6					
				Peningkatan layanan kebersihan jalan dan lingkungan	Koordinasi kota sehat Adipura	kali	50	10					
					Peningkatan ops dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan	keg	50	10					
				Konservasi, rehabilitasi lingkungan dan pertamanan	Cakupan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	ha	7	4.8					
					Persentase luas RTH perkotaan	%	55	15.5					

				Penataan konservasi dan rehabilitasi lingkungan	Penanaman bibit seluas 1 ha	ha	5	1					
				Pengelolaan RTH	Belanja bibit tanaman	bibit	105	21					
					Pengadaan alat pemeliharaan tanaman	Paket	20	4					
					Pemeliharaan dan penataan dekorasi kota	lokasi	95	19					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Keg. Perencanaan, Penganggaran , dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang bik dan tepat waktu				100	30	30,00	100	100	

	Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan renja dan perubahan renja DLH Kabupaten Sampang yang disusun				100	100	100,00	3	3	
	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah Dokumen RKA yang disusun				100	100	100,00	1	1	
	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Perubahan RKA yang disusun				100	100	100,00	2	2	
	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah Dokumen DPA yang disusun				100	100	100,00	1	1	
	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Penyusunan Perubahan DPA yang disusun				100	100	100,00	2	2	
	Sub. Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan LPPD, LKPj, LKJIP, SAKIP, RB yang disusun				5	5	100,00	4	4	
	Keg. Administrasi Keuangan Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu				14	9	64,29	100	100	
	Sub.Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN				14	14	100,00	102	91	
		Jumlah pembayaran honor daerah				14	14	100,00			
		Jumlah pembayaran honor PA/KPA/PPK				12	12	100,00			
		Jumlah pembayaran honor pengurus barang dan pembantu pengurus barang				12	12	100,00			
		Jumlah pembayaran honor PPBJ				12	12	100,00			
		Pembayaran TPP ASN				12	12	100,00			

	Sub Ke.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK				100	100	100,00	0	0	
	Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan				100	100	100,00	0	0	
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah penyusunan laporan akhir tahun yang disusun				100	100	100,00	1	1	
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan bulanan yang disusun				12	12	100,00	18	18	
		Jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran yang disusun				2	2	100,00			
		Jumlah penyusunan laporan keuangan triwulan yang disusun				4	4	100,00			
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian				100	22	22,00	100	100	
	Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					0	0	0,00	265	265	
	Sub Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/sosialisasi/seminar				20	4	20,00	3	3	
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun				15	8	53,33	100	100	

	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik				15	15	100,00	15	15	
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer yang terpenuhi				20	20	100,00	57	57	
		Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor yang terpenuhi				36	36	100,00			
		Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik				12	12	100,00			
		Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya				6	6	100,00			
		Jumlah obat obatan				25	25	100,00			
		Jumlah alat pembersih				1	1	100,00			
	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah Alat tulis kantor (jenis)							50	50	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk kantor selama 1 tahun				12	12	100,00	8	8	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Biaya langganan koran terpenuhi				12	12	100,00	12	12	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu dan rapat				2352	2352	100,00	10	10	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	T erlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar dinas				40	40	100,00	84	84	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				100	100	100,00	100	100	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional				3	1	33,33	0	0	
	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel untuk kantor				4	0	0,00	4	4	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan layar proyektor Jumlah pengadaan LCD proyektor Jumlah pengadaan printer Jumlah pengadaan scanner				1 1 2 1	0 0 2 0	40,00	4	4	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100	100	100,00	100	100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim				985	985	100,00	985	926	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya telpon, listrik, dan air kantor terpenuhi				12	12	100,00	12	12	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Honor Instruktur senam (bln)							12	5	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				100	8	8,00	100	100	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya pemeliharaan dan perizinan, pajak kendaraan/operasional terpenuhi				90	90	100,00	73	73	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan kantor terpenuhi				68	68	100,00	37	37	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dilaksanakannya pemeliharaan dan perbaikan untuk kantor				4	4	100,00	3	3	
	Penataan Organisasi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)							100	100	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Penataan Organisasi	Jumlah laporan SKM yang diselesaikan (lap)							1	1	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP										
	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya dokumen pengendalian dan pengelolaan LH				100	0	0,00	100	100	
	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten /Kota	Dokumen RPPLH Kabupaten Sampang				3	3	100,00	1	1	

	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya dokumen pendukung KLHS									
	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang tepenuhi				1	1	100,00			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH										
	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran lingkungan yang diselesaikan Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan				100,00 13,95	0		36	36	
	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah Gerakan Promosi Lingkungan Hidup yang Diadakan Jumlah Sampel Air yang Dianalisa Jumlah Sampel Udara Ambien yang Dianalisa Jumlah Usaha/Kegiatan yang Belum Memiliki Ijin Lingkungan/Ijin PPLH yang diberi Sosialisasi				2 56 24 350	0 0 6 15				
		Jumlah usaha/kegiatan yang tidak taat dan/atau belum memiliki ijin lingkungan/ijin PPLH yang diberi sosialisasi							140	140	

		(usaha)									
		Jumlah Sampel Air							36	36	
	Pengelolaan laboratorium LH Kab/kota	Jumlah Sampel Air Limbah yang Dianalisa secara Swapantau Jumlah Sertifikat Hasil Pengujian yang Diterbitkan				120 120	0 0				
		Jumlah usaha/kegiatan yang dianalisa air limbahnya (sampel)							45	35	
	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH kab/kota	Persentase pelanggaran lingkungan yang diselesaikan Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan				100,00 13,95	0		30	30	
	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diberikan pada Masyarakat				0	0	0,00	30	30	
	Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan LH	Jumlah rekomendasi penghentian pencemaran				0	0	0,00	0	0	

	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota	Persentase pelanggaran lingkungan yang diselesaikan Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan				100,00 13,95	0		100	100	
	Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	Jumlah rapat koordinasi hasil uji sumber pencemaran				3	3	100,00	2	2	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)										
	Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kab/Kota	Penghiajuan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Persentase luas RTH perkotaan				100,00 13,95	0				
		Ruang Terbuka Hijau (Ha)							6,622	6,622	
	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Jumlah taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan yang dikelola				10	10	100,00	5,622	5,622	
	Pengelolaan RTH	Peningk. Luas tutupan lahan				16,25	9	55,38	1	6,512	
	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Jumlah sarana dan prasarana taman				27	27	100,00	27	34	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)										

	Pengumpulan limbah B3 dalam 1 daerah Kab/Kota	Persentase penurunan timbulan sampah				24	0	0,00			
		Jumlah dokumen hasil koordinasi pengelolaan limbah B3 yang disusun (dok)							1	1	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan	Laporan hasil koordinasi limbah B3 yang disusun				1	1	100,00			
		Jumlah koordinasi pengelolaan limbah B3 yang dilaksanakan (kali)							4	8	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)										
	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase pelanggaran lingkungan yang diselesaikan				100	0	0,00			
		Jumlah pelaku usaha yang berijin dan taat (usaha)							60	53	
	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH yg diterbitkan				50	50	100,00	12	1	

	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan				150	150	100,00			
		Jumlah Usaha yang diawasi (usaha)							130	112	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										
	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang berwawasan lingkungan							100	100	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	jumlah komunitas peduli lingkungan yang didampingi							2	1	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air				5,5		0,00			
		Jumlah kelompok masyarakat binaan (kelp masy.)							3	3	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan				4		0,00	5	5	

	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LH										
	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kab/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				100	0	0,00	100	100	
	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran hukum				5	5	100,00	1	3	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										
	Pengelolaan persampahan	Persentase penurunan timbulan sampah				24	0	0,00			
		a. Persentase penanganan timbulan sampah (%)							14	14	
		b. Persentase pengurangan timbulan sampah (%)							1,10	1,04	
	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	Honorarium petugas TPS3R Pembangunan TPS3R Pembuatan sumur bor Pemenuhan peralatan sampah untuk TPS3R Pengadaan timbangan berat besi				21 1 1 12 1	21 1 1 12 1	100,00			
		Honorarium petugas TPS3R							21	21	

		Jumlah pengurangan sampah dari sumber ke TPA melalui TPS3R (Kec)							4	4	
	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan penanganan sampah				110000	110000	100,00			
		Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses sampai di TPA/TPS/SPA Kab/Kota (Ton)							7200	7300	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	pembinaan pengelolaan sampah di masyarakat				4	4	100,00	0	0	
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang diadakan				42	42	100,00	2	2	
	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST, SPA Kab/Kota	Pembangunan cell TPA Pengadaan incenerator				1 1	0 0	0,00			
		tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA (paket)							3	3	

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan yang digunakan pada tahun 2019-2020 adalah program dan kegiatan lama sesuai dengan yang terdapat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, sehingga kolom terkait Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (mulai kolom 6) tidak dapat terisi dikarenakan terdapat perbedaan nomenklatur program/kegiatan;
2. Program dan kegiatan yang digunakan pada tahun 2021 dan 2022 adalah program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 adalah target berdasarkan DPA DLH Tahun 2022.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2019 – 2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sampang

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Ind. Lain	Target Renstra Tahun 2019-2024				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)				58,97	59,71	60,45	61,2	62,28	60,31	62,28	60,31	
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan* (lembaga/usaha)				58	60	61	63	53	53	61	63	
3	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi: a. Jumlah pengurangan timbulan sampah (%) b. Jumlah penanganan timbulan sampah* (%)				3	1,10	1,12	1,15	3,66	1,04	1,12	1,15	
					13	14	14,5	15	13,5	12	14,5	15	

Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Sebagaimana termuat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024, isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Sampah

Permasalahan lingkungan yang paling utama di perkotaan antara lain adalah pengelolaan sampah. Jumlah timbulan sampah, bukan diartikan bahwa pengelolaan sampah semakin jelek, tetapi persoalan sampah justru menjadi perhatian yang besar terutama sampah merupakan faktor penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

b. SDM pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas

c. Penurunan Kualitas Udara

Sebagai daerah yang wilayahnya sebagai perlintasan transportasi, pencemaran udara semakin menampakkan kondisi yang perlu mendapat perhatian. Sumber pencemaran udara dapat berasal dari berbagai kegiatan antara lain industri, transportasi, perkantoran, dan perumahan. Berbagai kegiatan tersebut merupakan kontribusi terbesar dari pencemar udara yang dibuang ke udara bebas. Dampak dari pencemaran udara tersebut adalah menyebabkan penurunan kualitas udara, yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia

d. Penurunan Kualitas Air Permukaan/Sungai

Isu mengenai pencemaran air permukaan/sungai di daerah pertanian dan pertambakan menjadi isu strategis karena walaupun upaya pengendalian pencemaran sungai terus dilakukan melalui berbagai program, namun kondisi sungai masih terjadi pencemaran.

Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan Menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup secara ideal;

- 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- 3 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan;
- 4 Perkembangan teknologi dan informasi.

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2023 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 dengan kebutuhan riil Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan - usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Sampang

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2023				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	10.379.567.466	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	10.379.567.466
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100 %	30.699.525	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100 %	30.699.525
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun (RPJMD, Renstra, dan Renja)	3 Dokumen	3.667.325	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun (RPJMD, Renstra, dan Renja)	3 Dokumen	3.667.325
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	5.580.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	5.580.700
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DLH	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	3.975.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DLH	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	3.975.000

2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	3.906.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	3.906.000
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen DPPA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	4.975.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen DPPA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	4.975.000
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Jumlah dokumen evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SAKIP, SPIP dan RB) yang disusun	5 Dokumen	8,795.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Jumlah dokumen evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SAKIP, SPIP dan RB) yang disusun	5 Dokumen	8,795.000
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	100 %	8.944.506.554	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	100 %	8.944.506.554
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	Jumlah Pegawai ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	102 orang	8.889.754.420	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	Jumlah Pegawai ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	102 orang	8.889.754.420
2.11.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	DLH	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	40.395.494	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	DLH	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	40.395.494
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	DLH	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	4.080.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	DLH	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	4.080.000

2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DLH	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	4.841.730	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DLH	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	4.841.730
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DLH	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	2 Dokumen	5.434.910	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DLH	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	2 Dokumen	5.434.910
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dengan jumlah ASN OPD	100 %	170.290.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dengan jumlah ASN OPD	100 %	170.290.000
2.11.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	DLH	Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta atributnya	314 org	108.975.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	DLH	Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta atributnya	314 org	108.975.000
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek / Diklat	20 OK	61.315.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek / Diklat	20 OK	61.315.000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	337.412.946	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	337.412.946
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	15 Jenis	17.937.330	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	15 Jenis	17.937.330
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan	6 jenis	40.989.715	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan	6 jenis	40.989.715

2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLH	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Jenis	43.682.925	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLH	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Jenis	43.682.925
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DLH	Jumlah pembayaran tagihan surat kabar	12 Bulan	3.840.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DLH	Jumlah pembayaran tagihan surat kabar	12 Bulan	3.840.000
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH	Jumlah makanan dan minuman staff meeting dan tamu yang difasilitasi	96 Ok	39.610.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH	Jumlah makanan dan minuman staff meeting dan tamu yang difasilitasi	96 Ok	39.610.000
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DLH	Jumlah BBM, jumlah perjalanan dinas biasa, jumlah perjalanan dinas dalam kota, penyediaan makananan dan minuman rapat	3648 ltr, 40 OK, 60 OK, 1359 OK	191.352.976	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DLH	Jumlah BBM, jumlah perjalanan dinas biasa, jumlah perjalanan dinas dalam kota, penyediaan makananan dan minuman rapat	3648 ltr, 40 OK, 60 OK, 1359 OK	191.352.976
2.11.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	367.491.381	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	367.491.381
2.11.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	DLH	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2	7 unit	195.000.000	Pengadaan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	DLH	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2	7 unit	195.000.000
2.11.01.2.07.05	Pengadaan meubel	DLH	Jumlah Pengadaan mebel	3 Jenis	23.615.570	Pengadaan meubel	DLH	Jumlah Pengadaan mebel	3 Jenis	23.615.570

2.11.01.2.07.06	Pengadaan peralatan mesin lainnya	DLH	Jumlah alat/bahan untuk kegiatan bahan computer, jumlah computer, jumlah laptop, jumlah layar proyektor, jumlah LCD, jumlah printer, jumlah TV	2 unit, 1 unit, 6 unit, 1 unit, 1 set, 4 unit, 2 unit	148.875.811	Pengadaan peralatan mesin lainnya	DLH	Jumlah alat/bahan untuk kegiatan bahan computer, jumlah computer, jumlah laptop, jumlah layar proyektor, jumlah LCD, jumlah printer, jumlah TV	2 unit, 1 unit, 6 unit, 1 unit, 1 set, 4 unit, 2 unit	148.875.811
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Prosentase pemenuhan jasa penunjang perkantoran	100 %	94.083.801	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Prosentase pemenuhan jasa penunjang perkantoran	100 %	94.083.801
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH	Jumlah surat tekirim	985 surat	4.061.593	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH	Jumlah surat tekirim	985 surat	4.061.593
2.11.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DLH	Jumlah pembayaran listrik, air dan tlp	12 bulan	79.822.208	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DLH	Jumlah pembayaran listrik, air dan tlp	12 bulan	79.822.208
2.11.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DLH	Honor instruktur senam, jumlah ADV/ucapan hari jadi	12 bulan, 6 kali	10.200.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DLH	Honor instruktur senam, jumlah ADV/ucapan hari jadi	12 bulan, 6 kali	10.200.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	403.450.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	403.450.000
2.11.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	DLH	Jumlah kendaraan sewa, jumlah pemeliharaan kendaraan, jumlah perijinan, pajak kend/ops terpenuhi	1 kend, 3 kend, 90 kend	262.900.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	DLH	Jumlah kendaraan sewa, jumlah pemeliharaan kendaraan, jumlah perijinan, pajak kend/ops terpenuhi	1 kend, 3 kend, 90 kend	262.900.000
2.11.01.2.09.	Pemeliharaan mebel	DLH	Jumlah	21 unit	6.300.000	Pemeliharaan mebel	DLH	Jumlah	21 unit	6.300.000

05			pemeliharaan mebel					pemeliharaan mebel		
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	DLH	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	53 unit	22.250.000	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	DLH	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	53 unit	22.250.000
2.11.01.2.09.09	Penataan organisasi	DLH	Jumlah kegiatan pameran, jumlah kegiatan pawai	1 keg, 1 keg	31.433.259	Penataan organisasi	DLH	Jumlah kegiatan pameran, jumlah kegiatan pawai	1 keg, 1 keg	31.433.259
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase tersedianya dokumen pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	29%	276.788.392	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase tersedianya dokumen pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	29%	276.788.392
2.11.02.2.01	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota		Persentase tersedianya dokumen pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	29%	276.788.392	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota		Persentase tersedianya dokumen pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	29%	276.788.392
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kab/Kota	DLH	Jumlah dokumen RPPLH Kab. Sampang yang terpenuhi	3 dok	276.788.392	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kab/Kota	DLH	Jumlah dokumen RPPLH Kab. Sampang yang terpenuhi	3 dok	276.788.392
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN		a. Persentase pelaku usahayang taat terhadap peraturan lingkungan, b. Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditangani	31%, 15.90%	460.779.876	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN		a. Persentase pelaku usahayang taat terhadap peraturan lingkungan, b. Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditangani	31%, 15.90%	460.779.876
2.11.03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota		Jumlah pelaku usaha yang taat	350 usaha	420.779.876	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota		Jumlah pelaku usaha yang taat	350 usaha	420.779.876

2.11.03.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah , air, udara, dan laut	DLH	Jumlah sampel air yang dianalisa, jumlah sampel udara ambient yang dianalisa, jumlah usaha/keg yg belum memiliki ijin lingk/ijin PPLH yg diberi sosialisasi	56 sampel, 24 sampel, 350 usaha	195.518.855	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah , air, udara, dan laut	DLH	Jumlah sampel air yang dianalisa, jumlah sampel udara ambient yang dianalisa, jumlah usaha/keg yg belum memiliki ijin lingk/ijin PPLH yg diberi sosialisasi	56 sampel, 24 sampel, 350 usaha	195.518.855
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium LH Kab/Kota	DLH	Jumlah usaha/keg yang dianalisa air limbahnya	200 sampel & sertifikat	225.261.021	Pengelolaan Laboratorium LH Kab/Kota	DLH	Jumlah usaha/keg yang dianalisa air limbahnya	200 sampel & sertifikat	225.261.021
2.11..03.2.02	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota		Jumlah informasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan LH yang disampaikan	40 informasi	21.056.318	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota		Jumlah informasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan LH yang disampaikan	40 informasi	21.056.318
2.11..03.2.02.01	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	DLH	Jumlah informasi peringatn pencemaran dan/atau kerusakan LH yang diberikan pada masyarakat terdampak	4 media cetak, 40 banner	21.056.318	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	DLH	Jumlah informasi peringatn pencemaran dan/atau kerusakan LH yang diberikan pada masyarakat terdampak	4 media cetak, 40 banner	21.056.318
2.11.03.2.03	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota		Persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditangani	100%	18.360.138	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota		Persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditangani	100%	18.360.138
2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	DLH	Jumlah rapat koordinasi hasil uji sumber pencemaran	3 rapat	18.360.138	Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	DLH	Jumlah rapat koordinasi hasil uji sumber pencemaran	3 rapat	18.360.138
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKAAGAMAN HAYATI (KEHATI)		a.Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air. b.Persentase luas RTH perkotaan	6 Ha, 12.40%	4.620.249.804	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKAAGAMAN HAYATI (KEHATI)		a.Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air. b.Persentase luas RTH perkotaan	6 Ha, 12.40%	4.620.249.804

2.11.04.2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati Kab/Kota		Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	6 Ha	4.620.249.804	Pengelolaan keanekaragaman hayati Kab/Kota		Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	6 Ha	4.620.249.804
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di luar kawasan hutan	DLH	Jumlah taman yang dikelola	2.37 Ha	2.722.790.184	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di luar kawasan hutan	DLH	Jumlah taman yang dikelola	2.37 Ha	2.722.790.184
	Pengelolaan RTH	DLH	Peningkatan luas tutupan lahan	6 Ha	247.493.905	Pengelolaan RTH	DLH	Peningkatan luas tutupan lahan	6 Ha	247.493.905
	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	DLH	Jumlah lembaga yang berwawasan lingkungan	30 lembaga	389.054.745	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	DLH	Jumlah lembaga yang berwawasan lingkungan	30 lembaga	389.054.745
	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	DLH	Jumlah sarana dan prasarana taman	27 titik lokasi	1.260.910.970	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	DLH	Jumlah sarana dan prasarana taman	27 titik lokasi	1.260.910.970
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3		a.persentase penanganan timbulan sampah, b.persentase pengurangan timbulan sampah	a. 14, b. 4 %	34.536.938	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3		a.persentase penanganan timbulan sampah, b.persentase pengurangan timbulan sampah	a. 14, b. 4 %	34.536.938
2.11.05.2.02	Pengumpulan limbah B3 dalam 1 daerah Kab/Kota		Jumlah data limbah B3 di Kab Sampang yang terakomodir	1 dok	34.536.938	Pengumpulan limbah B3 dalam 1 daerah Kab/Kota		Jumlah data limbah B3 di Kab Sampang yang terakomodir	1 dok	34.536.938
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah Propinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengoilahan, dan/atau penimbunan	DLH	Jumlah laporan hasil koordinasi limbah B3 yang disusun terpenuhi	1 dok	34.536.938	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah Propinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengoilahan, dan/atau penimbunan	DLH	Jumlah laporan hasil koordinasi limbah B3 yang disusun terpenuhi	1 dok	34.536.938
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IJIN		Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan	31%	158.500.921	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IJIN LINGKUNGAN DAN IJIN		Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan	31%	158.500.921

	LINGKUNGAN DAN IJIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH (PPLH)		lingkungan			PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH (PPLH)		lingkungan		
2.11.06.2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah pelaku usaha yang berijin dan taat	30 usaha	158.500.921	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah pelaku usaha yang berijin dan taat	30 usaha	158.500.921
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	DLH	Jumlah rekomendasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan /atau izin PPLH yang diterbitkan	30 rekomendasi	104.200.852	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	DLH	Jumlah rekomendasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan /atau izin PPLH yang diterbitkan	30 rekomendasi	104.200.852
2.11.06.2.01.03	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	DLH	Jumlah laporan hasil pengawasan	150 hasil pengawasan	54.200.069	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	DLH	Jumlah laporan hasil pengawasan	150 hasil pengawasan	54.200.069
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LH UNTUK MASYARAKAT		Jumlah kelompok masyarakat yang diberi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan	4%	26.195.792	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LH UNTUK MASYARAKAT		Jumlah kelompok masyarakat yang diberi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan	4%	26.195.792
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/ Kota		Persentase pelaku usaha/kegiatan yang berwawasan lingkungan	100%	26.195.792	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/ Kota		Persentase pelaku usaha/kegiatan yang berwawasan lingkungan	100%	26.195.792
2.11.08.2.01.02	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	DLH	Jumlah komunitas peduli lingkungan yang didampingi	3 komunitas	26.195.792	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	DLH	Jumlah komunitas peduli lingkungan yang didampingi	3 komunitas	26.195.792

2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LH		Persentase penyelesaian pengaduan di bidang LH	100%	32.340.507	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LH		Persentase penyelesaian pengaduan di bidang LH	100%	32.340.507
2.11.10.2.01	Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan LH (PPLH) Kab/Kota		Persentase penyelesaian pengaduan dibidang perlindungan pengelolaan LH	100%	32.240.507	Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan LH (PPLH) Kab/Kota		Persentase penyelesaian pengaduan dibidang perlindungan pengelolaan LH	100%	32.240.507
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota	DLH	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran hukum	5 pengaduan	32.340.507	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota	DLH	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran hukum	5 pengaduan	32.340.507
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		a.persentase penanganan timbulan sampah, b.persentase pengurangan timbulan sampah	a.14, b.4%	6.440.778.277	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		a.persentase penanganan timbulan sampah, b.persentase pengurangan timbulan sampah	a.14, b.4%	6.440.778.277
2.11.11.2.01	Pengelolaan sampah		a.persentase penanganan timbulan sampah, b.persentase pengurangan timbulan sampah	a.14, b.4%	6.440.778.277	Pengelolaan sampah		a.persentase penanganan timbulan sampah, b.persentase pengurangan timbulan sampah	a.14, b.4%	6.440.778.277
2.11.11.2.01.02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	DLH	Jumlah pengurangan sampah dari sumber ke TPA melalui TPS3R	125 ton	481.929.645	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	DLH	Jumlah pengurangan sampah dari sumber ke TPA melalui TPS3R	125 ton	481.929.645
2.11.11.2.01.03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di	DLH	Jumlah sampah yang dipilah dikumpulkan diangkut diolah dan diproses sampai TPA	7200 ton	3.348.258.960	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	DLH	Jumlah sampah yang dipilah dikumpulkan diangkut diolah dan diproses sampai TPA	7200 ton	3.348.258.960

	TPA/TPST/SPA Kab/Kota										
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	DLH	Pengadaan bak sampah karet, pengadaan bak sampah mobile, pengadaan mesin pengolahan sampah	205 bh, 31 unit, 2 unit	1.941.852.542	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	DLH	Pengadaan bak sampah karet, pengadaan bak sampah mobile, pengadaan mesin pengolahan sampah	205 bh, 31 unit, 2 unit	1.941.852.542	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPS/TPST/SPA Kab/Kota	DLH	Pengadaan flow meter, pengadaan incinerator sampah, pengadaan value	2 unit, 1 unit, 1 unit	668.737.130	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPS/TPST/SPA Kab/Kota	DLH	Pengadaan flow meter, pengadaan incinerator sampah, pengadaan value	2 unit, 1 unit, 1 unit	668.737.130	
JUMLAH TOTAL					21.480.741.653	JUMLAH TOTAL					20.816.619.511

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2023 sudah diakomodir dalam kebutuhan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2023, hanya saja nilai anggarannya berbeda jauh lebih tinggi yang di Renstra.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi – asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Sampang Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
1	2	3	4	5		6
A	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					
1	Pembangunan saluran drainase perumahan	Perumahan Barisan Indah Poros 1	Jumlah lokasi perumahan yang dipelihara prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	135	m	POKIR

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada perencanaan pembangunan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah berasal dari Pagu Indikatif Kewilayahan dan Pokok Pikiran .

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2023 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dengan Tema “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”.



Sumber: RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023

Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Sampang Tahun 2023

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	Prioritas Pembangunan 1: Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Pembangunan 1: Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Prioritas Pembangunan 1: Pemantapan pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan
2	Prioritas Pembangunan 2: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas Pembangunan 2: Penguatan Konektivitas antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Prioritas Pembangunan 2: Pemantapan pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan
3	Prioritas Pembangunan 3: Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Prioritas Pembangunan 2: Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pengentasan kemiskinan, kualitas Pendidikan, Kesehatan serta sarana dan prasarana dasar
4	Prioritas Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Pembangunan 4: Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestrasian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Prioritas Pembangunan 4: Menjaga Harmonisasi Kehidupan Masyarakat
5	Prioritas Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Prioritas Pembangunan 1: Pemantapan pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan
6	Prioritas Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 6: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Prioritas Pembangunan 1: Pemantapan pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan
7	Prioritas Pembangunan 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Pembangunan 7: Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Pelayanan Publik bagi Masyarakat Jawa Timur	Prioritas Pembangunan 4: Menjaga Harmonisasi Kehidupan Masyarakat dan Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan inovasi daerah

3.1.2 Target Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan Perangkat Daerah

NO.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2023
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,45	69,48
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan*	Lembaga/usaha	61	-
3	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi: a. Jumlah pengurangan timbulan sampah b. Jumlah penanganan timbulan sampah*	% %	1,12 14,5	- -

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2023 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2019 - 2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman pada Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2023

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Target 2023
	Tujuan:		
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,40
2	Meningkatnya akses prasarana dasar perumahan dan permukiman kumuh	Presentase akses prasarana dasar perumahan dan permukiman kumuh	0,019

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Target 2023
3	Meningkatnya Akses Infrastruktur Perumahan	Persentase pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur perumahan	20
	Sasaran:		
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	53,59
		Indeks Kualitas Udara	80,90
		Indeks Kualitas Lahan	34,44
2	Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi RTLH	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	3,07
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan	Persentase PSU perumahan yang difasilitasi	24

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2023

Dalam merumuskan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mendukung pada pencapaian misi 2 yaitu **“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”** dan misi 3 yaitu **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2019 - 2024, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 2 yaitu **“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”** dan misi 3 yaitu **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan”**.

Adapun program - program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu:

- Program kawasan permukiman

- Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
- Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
- Program perencanaan lingkungan hidup
- Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
- Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah berbahaya dan beracun (limbah B3)
- Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
- Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
- Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
- Program pengelolaan persampahan

Program - program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehinggaperumusan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2023 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1 04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										3,487,000,000		14,841,300,000
1 04 03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN										187,000,000		1,121,100,000
1 04 03 2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha										187,000,000		205,700,000
1 04 03 2.02 08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase berkurangnya rumah tidak layak huni yang ditangani Persentase Luas Permukiman kumuh yang ditangani	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Cakupan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman		41,87 % 5,55 %	1 Dokumen	63.03 %	187,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase berkurangnya rumah tidak layak huni yang ditangani Persentase Luas Permukiman kumuh yang ditangani	41,87 % 5,55 %	205,700,000
1 04 04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH										300,000,000		7,920,200,000
1 04 04 2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota										300,000,000		7,920,200,000
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase berkurangnya rumah tidak layak huni yang ditangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Cakupan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,87 %	9 Unit Rumah	63.03 %	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase berkurangnya rumah tidak layak huni yang ditangani	41,87 %	7,920,200,000
1 04 05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)										3,000,000,000		5,800,000,000
1 04 05 2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan										3,000,000,000		5,800,000,000
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah Lokasi Perumahan yang Dipelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Cakupan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	14 lokasi 1 Lokasi 17 lokasi	63.03 %	3,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	80 %	5,800,000,000
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2 11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										17,329,619,511		32,349,678,143
2 11 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										8,896,465,439		11,900,500,000
2 11 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										11,000,000		39,000,000
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	2 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	5,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	1 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	7,000,000
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	1 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	5,000,000
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	1 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	5,000,000
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	1 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	6,000,000
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	4 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	11,000,000
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7,756,105,439				10,012,500,000		
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	103 Orang/bulan	100 %	7,754,105,439	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	10,000,000,000
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	1 Laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	6,000,000
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	18 Laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	6,500,000
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							140,000,000				200,000,000		
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	1 Paket	100 %	115,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	120,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	20 Orang	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	80,000,000
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					277,862,000				367,000,000				
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100 %	12,000,000
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100 %	35,000,000
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	1 Paket	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100 %	35,000,000
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	1 Paket	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100 %	45,000,000
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	10 Dokumen	100 %	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100 %	5,000,000
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100 %	15,000,000
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	84 Laporan	100 %	167,262,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100 %	220,000,000
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					250,000,000				705,000,000				
2	11	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	450,000,000
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	55,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	16 Unit	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	200,000,000
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								152,500,000					169,000,000
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	1 Laporan	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	4,000,000
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	95,000,000
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	12 Laporan	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	70,000,000
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								308,498,000					405,000,000
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	90 Unit	100 %	238,598,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	270,000,000
2 11 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	20 Unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	15,000,000
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	35 Unit	100 %	17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	20,000,000
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	42,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	100,000,000
2 11 01 2.13	Penataan Organisasi								500,000					3,000,000
2 11 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	1 Laporan	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	3,000,000
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								40,000,000					65,000,000
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota								40,000,000					65,000,000
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Indeks Kualitas Air	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	53.59 indeks	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 %	65,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2 11 03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													1,880,000,000
2 11 03 2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota													1,580,000,000
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase pemenuhan baku mutu air Persentase pemenuhan baku mutu udara	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks kualitas air	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 % 84,85 %	39 Dokumen	53.59 indeks	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan baku mutu air Persentase pemenuhan baku mutu udara	80 % 84,85 %		80,000,000
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan baku mutu air Persentase pemenuhan baku mutu udara	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Indeks kualitas air	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	80 % 84,85 %	50 Dokumen	53.59 indeks	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan baku mutu air Persentase pemenuhan baku mutu udara	80 % 84,85 %		1,500,000,000
2 11 03 2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota													300,000,000
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase pemenuhan baku mutu air Persentase pemenuhan baku mutu udara	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Indeks kualitas air	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 % 84,85 %	37 Laporan	53.59 indeks	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan baku mutu air Persentase pemenuhan baku mutu udara	80 % 84,85 %		300,000,000
2 11 04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)													5,400,000,000
2 11 04 2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota													5,400,000,000
2 11 04 2.01 02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Persentase peningkatan luasan RTH	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks kualitas lahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,9 %	5.622 Ha	34.4 indeks	1,040,001,066	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan luasan RTH	0,9 %		3,600,000,000
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase peningkatan luasan RTH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks kualitas lahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,9 %	1 Ha	34.4 indeks	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan luasan RTH	0,9 %		300,000,000
2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Persentase peningkatan luasan RTH	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Indeks kualitas lahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,9 %	33 Unit	34.4 indeks	779,998,934	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan luasan RTH	0,9 %		1,500,000,000
2 11 05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)													5,200,000,000
2 11 05 2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													5,200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 05 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase limbah B3 yang dikelola	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Indeks Kualitas Air	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63 %	1 Dokumen	53.59 indeks	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase limbah B3 yang dikelola	63 %	5,200,000,000
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								165,000,000					255,000,000
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								165,000,000					255,000,000
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Indeks kualitas air	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 %	15 Dokumen	53.59 indeks	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan	36 %	95,000,000
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kualitas air	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 %	150 Laporan	53.59 indeks	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan	36 %	160,000,000
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								20,000,000					25,000,000
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								20,000,000					25,000,000
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok masyarakat yang diberi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Indeks Kualitas Udara	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 kelompok	2 Dokumen	80.9 indeks	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kelompok masyarakat yang diberi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan	5 kelompok	25,000,000
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								100,000,000					400,000,000
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000					400,000,000
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Indeks kualitas lahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 kelompok masyarakat	3 Entitas	34.44	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	5 kelompok masyarakat	400,000,000
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								10,000,000					25,000,000
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								10,000,000					25,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan di bidang lingkungan hidup	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Indeks Kualitas Air	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	53.59 indeks	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelesaian pengaduan di bidang lingkungan hidup	100 %	25,000,000
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								5,648,154,072					7,199,178,143
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah								5,648,154,072					7,199,178,143
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase penanganan timbulan sampah Persentase pengurangan timbulan sampah	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Indeka kualitas Air	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 4,1 %	14 Laporan	53.59 indeks	272,141,888	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan timbulan sampah Persentase pengurangan timbulan sampah	15 % 4,1 %	800,000,000
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase penanganan timbulan sampah Persentase pengurangan timbulan sampah	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Indeka kualitas Air	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 4,1 %	8030 Ton	53.59 indeks	3,585,154,072	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan timbulan sampah Persentase pengurangan timbulan sampah	15 % 4,1 %	4,411,365,378
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan timbulan sampah Persentase pengurangan timbulan sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Indeka kualitas Air	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 4,1 %	10 Kelompok	53.59 indeks	82,858,112	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan timbulan sampah Persentase pengurangan timbulan sampah	15 % 4,1 %	87,310,765
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan timbulan sampah Persentase pengurangan timbulan sampah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Indeka kualitas Air	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 4,1 %	2 Dokumen	53.59 indeks	970,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan timbulan sampah Persentase pengurangan timbulan sampah	15 % 4,1 %	800,000,000
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase penanganan timbulan sampah Persentase pengurangan timbulan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Indeka kualitas Air	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 4,1 %	2 Unit	53.59 indeks	738,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan timbulan sampah Persentase pengurangan timbulan sampah	15 % 4,1 %	1,100,502,000
TOTAL									20,816,619,511					47,190,978,143

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang mengampu urusan lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman. Program-program Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman pada Tahun 2023 mendukung prioritas pembangunan “**Prioritas 1: Pemanjapan pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan**” dan “**Prioritas 2: Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pengentasan kemiskinan, kualitas pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana dasar**”. Sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2023**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			3.487.000.000
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			187.000.000
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase berkurangnya rumah tidak layak huni yang ditangani Persentase Luas Permukiman kumuh yang ditangani	41.87 % 5.55 %	187.000.000
1 04 03 2.02 08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalis	1 Dokumen	187.000.000
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			300.000.000
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase berkurangnya rumah tidak layak huni yang ditangani	41.87 %	300.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	9 Unit Rumah	300.000.000
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			3.000.000.000
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	80 %	3.000.000.000
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Dipelihara Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	14 lokasi 1 Lokasi 17 lokasi	3.000.000.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			17.329.619.511
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.896.465.439
2 11 01 2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	11.000.000
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000
2 11 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000
2 11 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2 11 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000
2 11 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000
2 11 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.000.000
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	7.756.105.439
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bu	7.754.105.439
2 11 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000
2 11 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.000.000
2 11 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	140.000.000
2 11 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	115.000.000
2 11 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	20 Orang	25.000.000
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100 %	277.862.000
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000
2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	3.600.000
2 11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan	167.262.000
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	250.000.000
2 11 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	120.000.000
2 11 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	30.000.000
2 11 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	100.000.000
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	152.500.000
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	308.498.000
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	238.598.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2 11 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	10.000.000
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	17.500.000
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	42.400.000
2 11 01 2.13	Penataan Organisasi	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	500.000
2 11 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	500.000
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			40.000.000
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 %	40.000.000
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	40.000.000
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			525.000.000
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan baku mutu air Persentase pemenuhan baku mutu udara	80 % 84.85 %	450.000.000
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	39 Dokumen	50.000.000
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	50 Dokumen	400.000.000
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan baku mutu air Persentase pemenuhan baku mutu udara	80 % 84.85 %	75.000.000
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	37 Laporan	75.000.000
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			1.900.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan luasan RTH	0.9 %	1.900.000.000
2 11 04 2.01 02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5.622 Ha	1.040.001.066
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	80.000.000
2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	33 Unit	779.998.934
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			25.000.000
2 11 05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase limbah B3 yang dikelola	63 %	25.000.000
2 11 05 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	25.000.000
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			165.000.000
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan	36 %	165.000.000
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	15 Dokumen	90.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup. Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan. Persetujuan Lingkungan. Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150 Laporan	75.000.000
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN. PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			20.000.000
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan. Pelatihan. dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang diberi pendidikan. pelatihan dan penyuluhan	5 kelompok	20.000.000
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	20.000.000
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			100.000.000
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	5 kelompok masyarakat	100.000.000
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	100.000.000
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			10.000.000
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan di bidang lingkungan hidup	100 %	10.000.000
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	2 Dokumen	10.000.000
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			5.648.154.072
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan timbulan sampah Persentase pengurangan timbulan sampah	15 % 4.1 %	5.648.154.072
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan. Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan. Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	14 Laporan	272.141.888

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan. Pengumpulan. Pengangkutan. Pengolahan. dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah. Dikumpulkan. Diangkut. Diolah. Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	8030 Ton	3.585.154.072
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat. Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Kelompok	82.858.112
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat. Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2 Dokumen	970.000.000
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan. Pengumpulan. Pengangkutan. Pengolahan. dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	738.000.000

Pada Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman akan melaksanakan urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Lingkungan Hidup dengan total anggaran Rp. 20.816.619.511.- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 2 urusan. 13 program dan 21 kegiatan, dan 50 sub kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dan lingkup Kabupaten Sampang.

4.2 Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2023

Inovasi yang akan dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2023 dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja dan/atau untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang diampu, antara lain:

1. Si JeLiTA (Sistem Jemput Limbah Tepat dan Akurat).
Sistem Jemput Limbah Tepat dan Akurat merupakan upaya untuk mempercepat dan meningkatkan synergy antar stakeholder dalam pengawalan pemantauan kualitas lingkungan sehingga kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sampang dapat terjaga. Sistem jemput limbah ini dilakukan dengan menggunakan media sosial whatsapp sebagai sarana komunikasi dan informasi antara pengusaha dengan Tim SiJeLiTA dalam menjaga kualitas lingkungan Kabupaten Sampang.
2. GaSPoL (Gerakan Sekolah dan Pelajar Berorientasi Lingkungan).
Gerakan Sekolah dan Pelajar Berorientasi Lingkungan merupakan suatu upaya Pemerintah Kabupaten Sampang dalam Menciptakan Sekolah Adiwiyata bertaraf Nasional di Kabupaten Sampang serta terwujudnya generasi milenial peduli dan berbudaya lingkungan; dengan penetapan Sekolah Rujukan yang memiliki peranan menduplikasikan atau/ sebagai pusat informasi pengenalan program Adiwiyata pada setiap jenjang sekolah.
3. GeMeS MaS (Gemar Mengelola Sampah Mandiri Swadaya).
Gemar Mengelola Sampah Mandiri Swadaya merupakan suatu upaya Pemerintah kepada masyarakat agar secara mandiri mengurangi permasalahan sampah rumah tangga di lingkungan masyarakat Kabupaten Sampang dengan membiasakan mengelola sampah dari rumah, membangun kreativitas dan kemandirian masyarakat mengelola sampah yang berorientasi lingkungan dan ekonomis dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mendorong terbentuknya TPS3R yang mandiri.
4. PeSona TPA (Pengelolaan Sampah Berorientasi Teknologi Tepat Guna di Tempat Pemrosesan Akhir).
Pengolahan Sampah Berorientasi Teknologi Tepat Guna di Tempat Pemrosesan Akhir merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat terhadap manfaat pengelolaan sampah melalui taman edukasi di lingkungan TPA.
5. Tesi Ekspres (Taman Edukasi, Rekreasi, dan Ekspresi).
Taman edukasi, rekreasi, dan ekspresi merupakan sarana taman yang menyajikan kegiatan rekreasi berbasis edukasi dan ekspresi bagi generasi

mjlineal maupun masyarakat pada umumnya dan sebagai penunjang masyarakat dalam pembentukan karakter cinta pada lingkungan hidup.

6. e-ROMASAHABAT (Elektronik pROposal ruMAh SAMPang HebAt BermartabAT)

Inovasi layanan kemudahan pengajuan proposal perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat Kabupaten Sampang melalui Aplikasi E-ROMASAHABAT. Diharapkan inovasi ini dapat menjangkau usulan masyarakat lebih luas dan terselenggara merata pada seluruh kecamatan di Kabupaten Sampang

7. Video Si Ramah (Video Sosialisasi Peraturan Perumahan).

Video SI Ramah merupakan inovasi pembaruan metode sosialisasi mengenai Peraturan Perumahan yang disajikan lebih menarik, efektif dan efisien. Diharapkan Masyarakat dan Pengusaha (Developer Perumahan) mendapatkan informasi yang lengkap mengenai PSU Perumahan secara terbuka, cepat dimanapun dan kapanpun.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang merupakan rencana kerja tahunan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2023 dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sampang yang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 yaitu **Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Pemantapan Pemulihan Ekonomi serta Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Menuju Sampang Hebat Bermartabat.**

Renja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan teknis yang memuat rencana program dan kegiatan dalam urusan lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023 dan hasil evaluasi atas Renja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang tahun lalu.

Dengan adanya Renja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan arah kebijakan program dan kegiatan untuk mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup, layanan perumahan dan permukiman serta menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Sampang khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

5.1 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2023, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan

sasaran perangkat Daerah. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronisasi dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan sehingga akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2023 ini, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang pada Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SAMPANG

A. FAISOL ANSORI, SP. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19730303 199803 1 005